

BAB V

KESIMPULAN

Muhammadiyah sebagai salah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia tidak terlepas dari dinamika kehidupan masyarakat, termasuk politik yang terjadi di Indonesia. Begitu juga dengan Muhammadiyah di Kota Pariaman yang resmi berdiri pertama kali di Kurai Taji tahun 1929 dengan status sebagai Ranting. Memasuki masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah Ranting Pariaman naik status menjadi Cabang dari Muhammadiyah Kabupaten Padang Pariaman. Akhirnya, setelah 6 tahun reformasi di Indonesia, tanggal 24 Oktober 2004 Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman resmi berdiri. Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman berdiri mengikuti perubahan status Kota Pariaman, dari Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kota Otonom Pariaman.

Lahirnya Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman telah memudahkannya dalam membangun berbagai amal usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsistensi dalam kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman, menyebabkannya dapat menyusupi masyarakat Tarekat Sayattariah yang mendominasi masyarakat Kota Pariaman. Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman berhasil merangkul para pengikut Tarekat Syattariah yang notabeneanya ada perbedaan dalam menjalankan praktek ajaran agama Islam.

Secara garis besar Muhammadiyah yang berfaham modern bertolak belakang dengan aliran Tarekat Syattariah yang berfaham tradisional (Kaum Kuno). Sejak awal, masuknya Muhammadiyah di Kota Pariaman, terjadi berbagai gesekan, seperti para pengikut Tarekat Syattariah menganggap Muhammadiyah sebagai aliran sesat. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya memasuki Era Reformasi kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kota Pariaman telah mengalami perubahan yang signifikan. Para pengikut aliran Tarekat Syattariah sudah mulai menerima Muhammadiyah Kota Pariaman dan menjadi simpatisan dari Muhammadiyah Kota Pariaman.

Keberhasilan Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman dalam merangkul para pengikut Tarekat Syattariah, terutama di Era Reformasi tidak terlepas dari amal usahanya, terutama di bidang sosial dan pendidikan. Keberhasilan tersebut didukung oleh situasi yang kondusif, yaitu setelah gempa tahun 2009. Akibat gempa, keadaan Kota Pariaman mengalami kerusakan parah dan membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. AUMSos (Amal usaha Muhammadiyah dibidang sosial) sebagai amal usaha yang bersifat nasional, berhasil mengumpulkan dana dan membantu masyarakat Kota Pariaman yang terdampak gempa tahun 2009, sebagai bagian dari amal sosialnya.

Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman telah mengambil tempat terdepan dalam penanggulangan bencana gempa di Kota Pariaman. Melalui MCDC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*), yang dikirim langsung oleh PP Muhammadiyah, Muhammadiyah Kota Pariaman bergerak membantu masyarakat Kota Pariaman. Bagi Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman, memberikan bantuan

bahan sembako kepada masyarakat Kota Pariaman merupakan salah satu prioritas. Selain itu, Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman membuka sekolah darurat yang berada di aula Masjid Sejarah Muhammadiyah Kurai Taji selama dua tahun..

Setelah gempa, Muhammadiyah semakin diterima oleh masyarakat Kota Pariaman. Elit-elit Muhammadiyah memanfaatkan situasi tersebut dengan masuk ke dalam politik praktis. Tampilnya elit-elit Muhammadiyah dalam politik di Kota Pariaman tidak membuat Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman menjadi organisasi politik. Muhammadiyah Kota Pariaman sebagai organisasi tidak terlibat dengan aktifitas politik praktis, tetapi memperbolehkan setiap kader-kadernya untuk berkecimpung dalam dunia politik praktis di Kota Pariaman. Namun, Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman tetap menjalin hubungan dengan berbagai partai politik ataupun dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk mengembangkan amal usahanya.

Terdapat tiga partai politik yang didominasi oleh kader-kader Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman, yaitu: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) lebih kepada kader-kader muda Muhammadiyah Kota Pariaman. Sehingga, hubungan Muhammadiyah Kota Pariaman dengan Pemerintah Kota Pariaman lebih mudah terjadi akibat kader-kader Muhammadiyah yang mengisi posisi strategi di pemerintahan Kota Pariamana. Elit-elit Muhammadiyah yang terlibat dengan politik praktis, dilarang membawa nama organisasi dalam tindakan politiknya, tetapi secara individu .

Sementara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda), para kader Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman yang tampil dalam Pilkada Pariaman, yaitu Helmi Darlis (2008, 2013) dan Mardison Mahyuddin (2018). Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman tidak pernah membuat intruksi khusus kepada warga Muhammadiyah di Kota Pariaman untuk mendukung calon dari Muhammadiyah. Muhammadiyah Daerah Kota Pariaman memberikan kebebasan kepada seluruh anggota dan simpatisannya dalam menentukan pilihan politiknya. Warga Muhammadiyah Kota Pariaman secara individu memilih Mardison Mahyuddin dalam Pilkada tersebut. Sehingga, Mardison Mahyuddin berhasil menjadi Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023.

